

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai kota metropolitan. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi di sebelah timur, dengan Kabupaten Bogor dan kota Depok dibagian selatan, serta sebelah barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Hingga saat ini, lokasi Provinsi DKI Jakarta sangat strategis dan merupakan pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional. Menurut fungsi kotanya, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli perkotaan bahwa DKI Jakarta memiliki tujuh fungsi utama kota, yaitu sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat, pusat perdagangan dan distribusi, pusat keuangan, pusat pariwisata, pusat pelatihan dan informasi, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat seni budaya. Data lain menunjukkan bahwa perekonomian di Jakarta mencapai 60% dari seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia.¹

Pertumbuhan dan perkembangan Jakarta membawa pengaruh terhadap perluasan fungsi dan peranan yang harus dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta disamping berstatus sebagai pemerintah daerah juga berstatus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Pemerintahan sebesar kota Jakarta dihadapkan pada tugas yang lebih kompleks untuk memperbaiki kondisi

¹ Nurrokhmah Rizqihandari, *Karakter Kemiskinan dan kaitannya dengan struktur kota DKI Jakarta*, (Tesis Program Studi Kependudukan dan Ketenagaan Kerja, Universitas Indonesia. Depok. 2010, Tidak diterbitkan), h. 1.

kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi warganya, antara lain menentukan dan mengatur penggunaan tanah, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, komunikasi dan rekreasi. Rakyat menghendaki agar negara atau lembaga-lembaga pemerintah mengusahakan kebutuhan para warga kota Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintah sudah tentu wajib ikut bertanggung jawab terwujudnya harapan rakyat.

Harapan untuk mewujudkan citra Jakarta sebagai kota yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia, maka Presiden Soeharto mengangkat Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2002 menggantikan Soerjadi Soedirdja. Sutiyoso merupakan orang yang dapat memimpin Jakarta selama dua periode selain Ali Sadikin. Beliau pun diakui sebagai salah satu gubernur terbaik yang pernah memerintah Jakarta dan juga mengalami pergantian presiden terbanyak selama dia menjabat sebagai gubernur Jakarta.²

Pada periode awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta, Sutiyoso merancang Rencana Strategis 1997-2002. Visi pertamanya, ingin Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di negara maju. Kedua, ingin warga Jakarta sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan. Namun realisasi visi itu terpaksa tertunda. Hal tersebut disebabkan karena terjadi guncangan moneter pada perekonomian Indonesia yang berawal dari krisis ekonomi Asia. Dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan Indonesia, di negara yang terakhir ini, krisis ekonomi paling parah terjadi. Gelar yang semula

² Ch. Rbin Simanullang, *Sutiyoso Gubernur DKI Jakarta Dimasa Sulit Era Lima Presiden*. (Jakarta: Pustaka Tokoh Indonesia, 2014), h. 4.

disandang oleh kawasan ini yaitu “The Miracle Of Asia “ pun dibalik menjadi The “Melt Down of Asia, “atau Asia yang meledak, yang mengkerut.³ Guncangan moneter itu kemudian berlanjut ke situasi turbulensi ekonomi, sosial dan politik berbulan-bulan hingga mencapai puncaknya pada pertengahan Mei 1998 yang pada akhirnya berakibat pada pelengseran presiden Soeharto.⁴

Dengan adanya krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia, Jakarta yang dalam hal ini merupakan pusat perekonomian Indonesia tidak bisa mengelak dari kondisi tersebut. Perekonomian Jakarta pun ikut terguncang, laju pertumbuhan ekonomi merosot dari 5,11% menjadi minus 17,49%. Angka inflasi melonjak dari 11,74% menjadi 74,42%. Pengangguran meningkat dari 443.000 orang menjadi 499.500 dan jumlah orang miskin bertambah dari 231.000 menjadi 861.000 orang.⁵ Selain menyebabkan hal-hal tersebut, krisis moneter yang menjangar keberbagai dimensi kehidupan tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan dan rasa frustrasi di masyarakat. Dengan kondisi tersebut, masyarakat mudah sekali terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berujung pada timbulnya kekerasan dan berakibat pada runtuh serta merosotnya ketertiban di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penjarahan besar-besaran di pusat-pusat perdagangan, terjadinya tindak kekerasan berbau SARA, serta pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan-perempuan ras tertentu.

³ Denny J, A, *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 16.

⁴ Andrinof A Chaniago, *Gagalnya pembangunan: membaca ulang keruntuhan orde baru* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 253.

⁵ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Dari Jenderal Tempur Menjadi Pamong Praja Semasa Lima Presiden* (Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2007), h. 17.

Menghadapi situasi yang begitu buruk tersebut, Sutiyoso bertekad untuk membangkitkan kembali Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman. Tetapi usaha tersebut penuh dengan tantangan. Perubahan drastis dari kondisi kekuasaan terpusat dan kebebasan terkontrol menjadi kekuasaan terkontrol dan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya membuat pemulihan dan rehabilitasi menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Dengan kondisi yang sangat buruk itu, Sutiyoso pada periode pertama sebagai gubernur memprioritaskan pemulihan Jakarta agar tetap survive sebagai pusat pemerintahan, Ibukota Negara, pusat perekonomian, pusat pendidikan, pintu gerbang internasional, kota pariwisata dan kota budaya. Untuk itu, ketertiban dan keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu. Secara simultan dengan upaya pemulihan rasa aman, Sutiyoso juga mendatangi pusat-pusat perdagangan seperti Glodok yang sempat mati akibat kerusuhan. Dia memberikan keyakinan rasa aman bagi warga untuk segera menghidupkan kembali pusat perdagangan tersebut.⁶

Selain menghadapi dampak yang ditimbulkan dari krisis moneter dan ekonomi yang berujung pada pergantian era serta melahirkan kebebasan yang berlebihan dimasyarakat, Sutiyoso juga harus menghadapi kompleksitas permasalahan yang selalu menghantui ibu kota seperti banjir, kemacetan lalu lintas, sampah, dan gelandangan. Pada masa kedua Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2002-2007, Sutiyoso memfokuskan pada pemulihan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, penegakan supremasi hukum dan peningkatan ketertiban umum, dengan program utama perbaikan infrastuktur

⁶ Ch. Rbin Simanullang, *op.cit*, hh. 44-46.

sosial-ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini ditujukan dengan maksud agar visi pembangunan DKI Jakarta 2002-2007 yaitu terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien, berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dapat dicapai.⁷

Satu per satu problem kota Jakarta berusaha diatasi. Pencanaan Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban banjir di Jakarta. Trans Jakarta yang menuai kontroversi tetap diselenggarakan dan pada akhirnya, yang semula ditentang banyak pihak bisa berjalan. Hasilnya hari ini sarana transportasi itu dapat dinikmati oleh penduduk Jakarta.⁸ Penyelenggaraan Transjakarta sebagai salah satu solusi dari perbaikan transportasi yang dicanangkan Sutiyoso, proyek ini juga dapat dilihat sebagai usaha pemerintah kota untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah pada warga kota. Usaha ini lebih jauh dapat diterjemahkan sebagai misi pemerintah untuk menemukan legitimasi di mata publik melalui suatu teladan yang melibatkan penduduk kota.⁹

Sejak memasuki tahun 2000-an, disadari atau tidak Jakarta telah berkembang dari sebuah kota metropolitan menjadi megapolitan. Pada tahun 2005, penduduk di kota Jakarta sebanyak 8.603.776 juta jiwa yang bertempat tinggal di atas tanah seluas 661,62 hektar persegi. Bila ditambah dengan masyarakat commuter yang setiap hari ngelaju dari masyarakat yang tinggal di

⁷ Veronica Adelin Kumurur, *Pembangunan Kota & Kondisi Kemiskinan Perempuan*. (Manado: Pplh-Sda Unsrat Press, 2010), hh. 85-86.

⁸ H. Soeparmo, *Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012* (Jakarta: BKKI,2012), h. 5.

⁹ Abidin Kusno, *Ruang Publik, Identitas Dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Soeharto* (Yogyakarta: Ombak, 2009), h. 132.

wilayah Bodetabekjur ke Jakarta untuk bekerja, jumlah penduduknya mencapai lebih dari 12 juta jiwa. Jumlah sebesar ini merupakan salah satu syarat terbentuknya kota megapolitan.¹⁰ Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang menempati dan juga beraktivitas di Jakarta, menimbulkan masalah baru bagi Jakarta itu sendiri. Luas areal pun yang sudah terbangun di Jakarta sebanyak 92%, sehingga betapa beratnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk menata Jakarta jika lahan yang tersedia hanya tinggal 8%.

Dengan realitas seperti itu, jika tidak ada upaya sistematis yang dilakukan untuk menata pemukiman dan membuat Jakarta sebagai kota megapolitan secara berkelanjutan, di khawatirkan dalam lima tahun kedepan Jakarta akan mengalami stagnasi. Tidak ada lagi lahan yang bisa dibangun dan penduduk Jakarta akan sangat sulit bergerak. Perkembangan kota Jakarta yang begitu cepat ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih berat dikemudian hari. Apa yang dialami Jakarta saat ini juga merupakan tren global, khususnya di kota-kota besar dunia. Hanya bedanya, kota-kota besar negara-negara maju sudah mengantisipasi “ancaman” perkembangan kota itu dengan kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan tersebut khususnya pada penataan ruang kota bersama kota-kota disekitarnya.¹¹

Melihat pembangunan Jakarta dan sekelilingnya yang semakin tidak beraturan, Sutiyoso pun menjawabnya dengan sebuah konsep Megapolitan

¹⁰ H. Moerdiman Reksomartono (2006). *Megapolitan Jabodetabekjur* (Jakarta: Pustaka Cerdasindo, 2006), h. 2.

¹¹ Sutiyoso, *Megapolitan Pemikiran Tentang Strategi Pembangunan Kawasan Terpadu dan Terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 17.

Jabodetabekjur. Sebuah konsep yang bukan “Jakarta mengakuisisi sekitarnya” namun Jakarta membangun aliansi strategis dengan lingkungan sekitarnya. Megapolitan ini pun memerlukan pelayanan publik yang prima untuk menata Jakarta sejajar dengan kota megapolitan dunia, sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu gagasan megapolitan bukanlah sebuah arogansi kekuasaan ibu kota negara yang berusaha mencaplok daerah lain disekitarnya. Masing-masing daerah diwilayahnya tetap berjalan sendiri-sendiri namun masterplan pembangunan harus menyatu dengan wilayah Jabodetabek.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Jakarta dimasa kepemimpinan Sutiyoso selama 10 tahun mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Pada masa awal jabatannya, Sutiyoso sudah dihadang dengan guncangan moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini tentu berdampak sangat besar bagi pembangunan Jakarta. Guncangan tersebut pun menimbulkan kerusuhan dan huru-hara yang berujung pada pelengseran presiden Soeharto yang juga menandai pergantian era, dari era Orde Baru menjadi era Reformasi. Di era Reformasi yang serba bebas dan tidak kondusif membuat Sutiyoso sebagai orang nomor satu di Jakarta mengambil langkah cepat dengan berusaha memulihkan keamanan dan ketertiban agar situasi tetap terkendali. Selain itu, untuk menjawab masalah-masalah seperti banjir dan kemacetan lalu lintas, Sutiyoso meluncurkan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Transjakarta pada periode kedua masa jabatannya. Disisi lain, dengan perkembangan sangat

¹² Firman Yursak, *Kepemimpinan Sutiyoso Di Mata Publik* (Jakarta: Next Reign Media, 2007), h. 22.

pesat yang dialami Jakarta dan berdampak pada lingkungan sekitarnya, Sutiyoso pun mengeluarkan gagasan Megapolitan sebagai cara untuk mengatasi masalah urbanisasi dan kesemrawutan yang melanda Jakarta. Tujuan dari gagasan megapolitan ini adalah agar Indonesia dapat memiliki ibukota negara yang dapat dibanggakan di dunia internasional.

Masalah pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Sutiyoso dijadikan sebagai topik penelitian skripsi ini dikarenakan masih kurangnya pembahasan secara menyeluruh terkait sejarah pembanguan Jakarta di masa kepemimpinan Sutiyoso. Selain itu mengapa topik ini dipilih sebagai fokus dalam penelitian adalah karena Sutiyoso sangat berperan besar dalam pembanguan Jakarta. Sutiyoso berani mengambil kebijakan yang tidak populer dan cenderung mendapatkan kritik yang keras dari warganya sendiri. Tetapi kebijakan-kebijakannya tersebut membuat perubahan yang sangat terasa manfaatnya dalam pembangunan Jakarta hingga hari ini. Selain itu, penulis memilih topik ini dikarenakan keunikannya dibanding masa pemerintahan gubernur Jakarta yang lain. Di masa kepemimpinan Sutiyoso ini, terjadi perubahan yang drastis dari Orde Baru yang otoriter ke masa Reformasi yang lebih bebas. Selain itu juga, Sutiyoso harus menghadapi pergantian presiden yang cukup banyak dari Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada dua buku yang secara khusus membahas tentang tindakan Gubernur Sutiyoso dalam membangun DKI Jakarta selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya (1997-2007), yaitu Dari Jenderal Tempur Menjadi Pamong Praja Semasa Lima Presiden Sutiyoso Gubernur DKI Jakarta 1997-2007 yang

merupakan buku catatan kronologis yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dan karya Ch. Rbin Simanullang, Sutyoso Gubernur DKI Jakarta Di Masa Sulit Era Lima Presiden.

Buku Dari Jenderal Tempur Menjadi Pamong Praja Semasa Lima Presiden Sutyoso Gubernur DKI Jakarta 1997-2007, secara terperinci mengungkapkan strategi dan pokok-pokok kebijakan yang dijalankan Sutyoso selama memimpin Jakarta. Buku ini merupakan sebuah catatan kronologis dari kepemimpinan Sutyoso selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Buku ini juga menggambarkan kondisi ekonomi, politik, sosial pada masa kepemimpinan Sutyoso. Meskipun begitu buku ini belum dapat objektif 100% karena faktor penulis dan penerbit yang berasal dari pemerintah provinsi DKI Jakarta itu sendiri, sehingga faktor untuk menjaga nama baik Sutyoso masih tampak di dalamnya.

Karya Ch.Robin Simanullang yang berjudul Sutyoso Gubernur DKI Jakarta Di Masa Sulit Era Lima Presiden ini ditulisnya berdasarkan wawancara langsung dengan Sutyoso. Buku ini berisi uraian tentang suka duka Sutyoso dalam memimpin pemerintah daerah ibu kota Indonesia. Buku ini juga menjelaskan bagaimana Sutyoso bisa menghadapi kondisi politik, ekonomi, sosial yang begitu kritis dan bisa survive hingga akhir masa jabatannya. Dalam buku ini terlihat kepiawaian Sutyoso dalam memimpin pembangunan Jakarta. Tetapi subjektifitas penulis sangat tampak besar dalam penulisan buku ini. Gambaran tentang kehebatan Sutyoso dan kelebihan-kelebihannya sangat ditonjolkan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Batasan temporal tulisan ini adalah 1997-2007. Penulis mengambil tahun 1997 sebagai batas temporal awal penulisan karena pada tahun ini Sutiyoso secara resmi menduduki jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Penulis mengambil tahun 2007 sebagai batas temporal akhir penulisan karena tahun tersebut batas akhir periode kedua Sutiyoso menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk batasan spasialnya, tulisan ini memusatkan perhatian pada wilayah DKI Jakarta yang merupakan wilayah kerja Sutiyoso saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang saya ajukan untuk proposal ini adalah:

1. Bagaimana strategi Sutiyoso dalam memimpin Jakarta di masa peralihan antara Orde Baru dan Reformasi ?
2. Bagaimana hasil dari strategi Sutiyo dalam memulihkan Jakarta pasca krisis moneter dan kerusuhan 1998 ?
3. Bagaimana upaya Sutiyoso dalam membangun Jakarta agar menjadi kota yang representatif sebagai ibukota negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian berjudul Sutyoso dan Pembangunan Jakarta (1997-2007) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait pembangunan Jakarta di masa kepemimpinan Sutyoso.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk dapat mengambil segi-segi positif dari kepemimpinan Sutyoso dalam membangun Jakarta dan juga sebagai bahan rujukan bagi daerah lainnya dalam mengelola organisasi dan keuangan daerah guna menuju otonomi daerah yang kuat secara finansial dan sumber daya manusia.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian secara lengkap dan operasional sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang meliputi empat tahap, yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi .¹³

Tahap awal dari penelitian ini adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Data-data penelitian didapatkan penulis melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memperoleh sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang didapatkan penulis dari wawancara dengan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn.)

¹³ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986, h. 18.

Dr. (H.C) H. Sutiyoso, Arsip-arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan majalah serta koran periode 1997-2007. Selain itu penulis juga menemukan sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang didapatkan penulis di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Setelah memperoleh data-data yang relevan, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber tersebut. Tahap ini disebut tahap verifikasi atau kritik sumber, tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran dengan membandingkan terhadap sumber yang lain. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik internal dengan membandingkan isi suatu sumber dengan sumber yang lain dan kritik eksternal berupa memeriksa keaslian sumber yang diperoleh. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan kumpulan majalah dengan buku karangan Ch.Robin Simanullang untuk mengetahui dan menguji kebenaran sumber. Sedangkan kritik eksternal dilakukan dengan cara memeriksa kondisi fisik buku dan kumpulan majalah tersebut.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, berbagai fakta yang diperoleh harus dirangkai dan dihubungkan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian karena tidak semua fakta bisa dimasukkan. Dalam hal ini hanya fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Sumber yang sudah valid seperti buku karangan Ch.Robin Simanullang dan kumpulan majalah bisa dilakukan interpretasi, fakta dari

sumber tersebut yang berkaitan dan relevan dapat disusun menjadi kisah sejarah,

Tahap terakhir adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah yang bersifat akademik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Bahan Sumber

Sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan penulis dari wawancara dengan Bapak Sutiyo, arsip-arsip Pemrov DKI Jakarta, dan juga majalah Gatra serta koran Kompas edisi 1997-2007.

Sumber data yang menunjang skripsi ini didapat dari buku-buku yang membahas tentang pembangunan Jakarta dan secara khusus buku-buku yang membahas tentang Sutiyo saat menjabat sebagai gubernur Jakarta. Buku-buku yang digunakan sebagai sumber penelitian skripsi ini antara lain buku tulisan Ch Robin Simanullang "*Sutiyo Gubernur DKI Jakarta Di Masa Sulit Era Lima Presiden*", buku pemerintah provinsi DKI Jakarta "*Dari Jenderal Tempur Menjadi Pamong Praja Semasa Lima Presiden Sutiyo Gubernur DKI Jakarta 1997-2007*", buku tulisan Veronica Adelin Kumurur "*Pembangunan Kota & Kondisi Kemiskinan Perempuan*", buku tulisan Sutiyo "*Megapolitan Pemikiran Tentang Strategi Pembangunan Kawasan Terpadu dan Terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur*", buku tulisan H. Soeparmo "*Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012*".